"Civil Society" Sebagai Kawasan Kebebasan

SYAMSURIZAL PANGGABEAN
Staf Pengajar Fisipol UGM Yogyakarta
dan Direktur Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Yogyakarta

Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan civil society di Indonesia?

Memang di Indonesia mulai marak pembicaraan mengenai *civil society*, dan belakangan ramai dan populer sekali, lebih-lebih 10 tahun belakangan ini. Berbicara mengenai *civil society*, sesungguhnya sama halnya berbicara sesuatu yang di Indonesia tidak menggunakan kata tersebut tetapi diganti dengan kelas menengah. *Civil society* bisa dikatakan kelanjutan dari wacana kelas menengah. *Civil society* merupakan sebuah *trend*. Kecenderungan study dan pembicaraan global dalam diskursus ilmu politik dunia menggunakan *civil society*. Di Indonesia itu baru muncul tahun 90-an atau diatas 90-an. Kenapa? Bukan berarti *civil society* adalah sebuah istilah yang baru muncul tahun 90-an akan tetapi dari dulu juga ada, tapi saya ingin katakan ada semacam *trend*, ketika wacana *civil society* meningkat pesat mulai pada tahun 80-an sampai 90-an. Ini dilihat dari banyak terbitnya buku-buku tentang *civil society*.

Bila kita amati, masing-masing tokoh atau pakar, membawa tafsir civil society sesuai dengan aliran atau madzab mereka sendiri. Apa itu tidak menyebabkan terpecah-pecahnya wacana civil society dan menyebabkan wacana ini menjadi kabur?

Tentunya seperti konsep-konsep yang ada dalam ilmu sosial, ia selalu kontroversial. Satu kata bisa memiliki banyak sekali definisi. Nasibnya sama dengan yang dialami kata kunci lain dalam ilmu sosial, seperti "kelas menengah" dan lain-lain.

Dan itu tidak harus dipahami secara seutuhnya?

Persoalannya satu saja, ini berkenaan dengan persoalan pasar, pasar bebas. Ada macam-macam dan beraneka ragam. Tetapi tetap ada benang merah yang bisa kita lihat, apa sebenarnya *civil society*. Pada intinya memang ilmuwan itu seperti pedagang, menjual dagangan dan menyerahkan kepada mekanisme pasar. Mana yang paling laku. Jualan mana, konsep mana yang laku, karena nanti akan terus bekerja dan kontroversial. Seperti apa yang dimaksud liberal, atau apa itu modernis, lalu kelas menengah, lalu masing-masing mengungkapkan maknanya sendiri-sendiri. Nasibnya sama dengan terma-terma yang lain.

Dan itu tidak mereduksi atau mengurangi konsep dan makna civil society?

Tidak. Karena seebagai suatu konsep, ia akan semakin kaya.

Kalau kita menengok kembali sejarahnya, civil society itu tidak muncul dari ruang kosong, tapi sebelum itu ada konsep-konsep yang mendahului. Dari konsep awal hingga yang paling mutakhir, dan itu ada saling keterkaitan. Lalu kita mengambil dan mencomot-comot sesuatu yang sudah jadi tanpa melibatkan proses terbentuknya konsep itu. Bagimana Anda melihat yang seperti itu ?

Jadi *civil society* itu bisa menjadi macam-macam, bisa jadi ideologi, jadi theori, jadi pendekatan, alat menganalisis. Sebagai contoh, kita sebagai bangsa Indonesia, dan sebagai customer dalam pasar ide itu. Katakanlah ada alat baru, *tool of analisys,* alat analis baru, dan nampaknya cocok di Indonesia, kemudian diambil, itu tidak apa-apa. Dan bangsa Indonesia perlu alat baru tersebut, seperti masyarakat sipil untuk memahami, menganalisis hubungan negara dan masyarakat. Ini memiliki arti penting yang menarik. Jadi salah satu fungsinya yang utama dari *civil society* di Indonesia, menurut saya adalah fungsi kritik.

Kritik apa yang Anda maksudkan?

Kritik terhadap Orde Baru. Ini menjadi alat untuk memukul Orba dan menelanjanginya, serta menyoroti kelemahannya. Itu yang menyebabkan kenapa dia populer. Jadi peran yang dimainkan kata atau theorisasi *civil society* adalah peran yang dimainkan oleh teori semisal marxisme. Ia juga pernah masuk sebagai kritik, sebagai ideologi, sebagai analisis dan sebagai theori. *Civil society* bisa memainkan peran seperti kata itu. Saya kira seiring dengan perkembangan paralel —tanpa ada hubungan sebab akibat— tetapi memang pada tahun 90-an ini, dikarenakan kegagalan sosialisme dan marxisme di Eropa Timur dan Tengah, di Uni Soviet, dan memang pengaruh marxisme sebagai kritik juga mulai turun. Maka kekosongan itu saya kira, pas sekali diisi oleh masyarakat sipil.

Sepertinya ada semacam pola eklektik dari aspek civil society. Kita hanya manfaatkan, kita pergunjingkan dari aspek politiknya, seperti public spear, penghadapan negara vis-à-vis masyarakat. Akan tetapi aspek lain seperti individualisme, rasionalisme, sekularisme, seperti yang ditampilkan oleh John Lock, tidak tersentuh sama sekali. Padahal itu bermanfaat juga buat kritik budaya. Kenapa hal itu sampai tenggelam?

Saya mengatakan arti pentingnya masyarakat sipil itu dalam rangka melawan rezim Orde Baru, bukan dalam rangka membebaskan individu, misalnya ...

Jadi lebih karena tantangan yang dihadapi?

Persoalan yang dihadapi masyarakat sipil di Indonesia, itu memang negara. Maka seringkali orang dalam membicarakan masyarakat sipil selalu dalam rangka melawan negara. Belum mulai melihat konsep masyarakat sipil sebagai wawasan pembebasan atau kawasan kebebasan.

Apakah sudah ada yang merambah ke sana, dan misalnya dikembangkan oleh siapa?

Saya kira LSM. Salah satu prinsipnya seperti itu. Mereka menggunakan konsep masyarakat sipil sebagai kawasan kebebasan. Memang itu merupakan salah satu penggunaan, di mana konsep *civil society* sebagai kawasan *non-state.* Bukan hanya *non-*

state, tapi juga *against state*. Bukan hanya kawasan non-negara, tapi juga melawan negara. Namun demikian juga ada penggunaan kawasan kebebasan dalam pengertian liberal.

Dalam konteks realitas, sejauhmana pengembangan civil society dalam arti liberal tersebut?

Itu masih lemah. Masyarakat sipil di Indonesia masih lemah, karena Orde Baru. Namun demikian bisa dilihat dinamisasinya atau kekuatannya. Sebab bagaimanapun Orde Baru tidak sepenuhnya membasmi, menaklukkan atau menundukkan semua semangat atau perlawanan yang ada di masyarakat sipil, sehingga ketika Orde Baru tumbang, kita bisa melihat kemampuan itu. Kalau kita menganggap salah satu inti dari masyarakat sipil itu otonomi, pluralisme, partisipasi, kita tetap bisa melihat itu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan sebuah masyarakat yang sudah 40-an tahun di bawah rezim otoriter, itu bisa melaksanakan pemilu yang menurut orang demokratis, dengan kekurangan yang perlu kita catat. Akan tetapi orang minimal mengatakan demokratis. Sekarang bagaimana Anda menjelaskan mengapa pemilu itu bisa berjalan dengan baik, kalau bukan karena kapasitas masyarakat sipil. Justru ketika pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, adalah ketika pelanggaran itu dilakukan oleh negara dan perpanjangan tangannya seperti Golkar dan birokrasi.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan bahwa civil society masih lemah, akan tetapi ada potensi atau kemungkinan-kemungkinan untuk bisa lebih maju, itu bagaimana?

Yang pasti bisa kita lihat pemilu. Misalnya begini, sebelum kita melaksanakan pemilu, banyak sekali prediksi dari para pengamat, dari media massa yang mengatakan akan terjadi banyak persoalan-persoalan dengan cara pandang yang sebenarnya keliru. Seperti kata-kata bahwa dulu saja partainya cuma 3 apalagi sekarang 40-an, tentu akan lebih kacau. Nanti pada masa kampanye dan pemilu akan ada kerusuhan dan kekacauan di mana-mana di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu orang mengeluarkan peta kerusuhan yang akan terjadi, padahal itu tidak terjadi.

Benteng-benteng yang masih bisa mempertahankan civility masyarakat itu lebih banyak dilakukan oleh siapa?

Yang jelas itu LSM, tetapi juga apa yang disebut dengan *civic culture*, budaya warga negara. Budaya itu sebenarnya ada, hingga di tingkat di desa segala macam, orang bisa berkompetisi, berpartisipasi melakukan sesuatu. Jadi ada soal norma, mungkin norma demokratis yang dulu tidak diperkenankan hidup bebas, sekarang norma itu bisa muncul kembali. Ada jaringan masyarakat sipil yang mungkin basisnya keagamaan, bahkan ketika umat Islam membuat parpol seperti NU dengan PKB dan Muhammadiyah dengan PAN terlihat daya cipta yang sangat kreatif. Ketika mereka tidak membuat partai yang khusus untuk Islam saja atau NU saja dan Muhammadiyah saja, akan tetapi bisa menerima orang lain. Jadi ada —yang tadi saya katakan daya cipta— yang sangat demokratis, pluralis dan berani keluar dari benteng ideologis masing-masing. Saya kira itu keberanian yang harus kita hormati. Dia

orang NU, tetapi berani keluar dari lingkungannya dan menerima orang lain, sehingga keterlibatan itu kelihatan. Di Muhammadiyah juga sudah, bahkan partai-partai yang terus terang menyatakan partai Islam juga malah kedodoran.

Beberapa waktu yang lalu kita sangat khawatir bahwa civic culture yang ada di lingkungan kita sempat hancur. Terjadi peningkatan kriminalitas, kerusuhan dan sebagainya. Itu sebenarnya fenomena apa?

Menurut saya, itu kritik terhadap rezim.

Apakah bukan sebagai anomali?

Bukan, tetapi itu kritik terhadap rezim. Kita juga jangan terlalu kejam melihat apa yang disebut kerusuhan atau apa. Dalam situasi Orde Baru, di mana partisipasi sangat minim dan masyarakat itu banyak sekali persoalan, sementara lembaga-lembaga perwakilan kita lemah, kerusuhan sebenarnya salah satu bentuk kritik yang harus dihargai keabsahannya. Dan itu menunjukkan, bagi saya, salah satu kritik terhadap rezim. Itu lebih menunjukkan daya dan energi masyarakat sipil dari pada penyakitnya. Kalau tidak, mereka harus diam lagi, dan diam pada saat itu sama aja Orde Baru jalan terus.

Ada kecemasan yang dipicu fenomena pasca pemilu. Jadi pemilu itu berlangsung cukup demokratis, tetapi kemudian hasil dari pemilu yang demokratis ini masih tanda tanya besar untuk menuju proses demokratisasi. Ini menunjukkan bahwa aspek formal dari demokrasi tidak cukup kuat mengantarkan cita-cita terciptanya masyarakat demokratis. Di sini diperlukan munculnya kultur penyangga berupa civil culture yang akan berperan penting menjaga lembaga-lembaga demokrasi formal itu. Apakah ini untuk masa mendatang relevan untuk dikembangkan?

Ini harus dua-duanya berjalan. Dalam arti *civic culture* tidak akan ada tanpa lembaga-lembaga demokratis. Dan lembaga-lembaga itu bisa tegak dengan topangan norma, nilai-nilai dan orang-orang yang demokratis. Tidak ada demokrasi tanpa kaum demokrat, tetapi juga kaum demokrat itu bisa dilahirkan oleh sebuah tatanan yang tidak demokratis. Dua-duanya kita perlukan untuk proses itu. Tapi juga kita memerlukan nilai-nilai demokrasi.

Bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan civic education?

Menurut saya, dengan cara menciptakan tatanan lembaga yang demokratis. Yaitu membuat tatanan lembaga yang demokratis. Beri kesempatan pada proses Pemilu supaya berjalan dengan baik. Buat lembaga perwakilan rakyat, berikan *check and balance* dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara itu. Ini salah satu cara untuk menciptakan hal tersebut. Misalnya, kita selalu mengatakan atau melakukan bahwa masyarakat kita itu tidak bisa menerima kekalahan dengan jantan dan baik sebab tatanan kelembagaan kita tidak pernah memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar kalah atau menang. Selama Orde Baru, yang menang itu menang terus, dan yang kalah, kalah terus. Dan kita tidak pernah diberi kesempatan belajar, dan ini bukan salah kita. Jadi kalau sudah ada tatanan kelembagaan untuk menentukan orang untuk menang dan untuk kalah, nanti nilai-nilai demokratis dalam bentuk toleransi politik juga akan tumbuh dengan

sendirinya. Memang toleransi politik itu sanagt sulit dibangun, ketika lembaga demokratis kita dalam hal ini negara sangat represif. Toleransi di situ sama dengan kematian, kejumudan dan ketiadaan kekuasaan.

Peran-peran civil society itu sendiri terhadap negara semacam ini, apakah perlu ikut serta dalam presure group?

Ini bisa dilakukan. Kita harus memikirkan bagaimana supaya pemimpin-pemimpin yang bagus di masyarakat politik itu bisa masuk ke lembaga-lembaga negara, di legislatif dan eksekutif. Dan ini berarti melalui pemilu dan mekanisme kepartaian. Dan itu artinya juga masyarakat sipil harus lebih menghormati atau menghargai parpol. Jadi daya sendiri tidak sependapat dengan kalangan masyarakat sipil, orang-orang yang terkadang memelihara sentimen anti partai. Pertanyaannya, kalau tanpa melalui parpol, dengan cara apa Anda bisa membawa, menggiring tokoh-tokoh yang bagus di masyarakat sipil pada tingkat tatanan kelembagaan negara. Apakah kita ingin supaya masyarakat sipil tetap di masyarakat sipil. Pada akhirnya masyarakat sipil harus lebih menghargai parpol dan pemilu sebagai lembaga-lembaga negara seperti parlementer, eksekutif, dan yudikatif.

Saat ini ada pemahaman baru terhadap civil society, yaitu dibahasaagamakan menjadi "masyarakat madani", bagaimana tanggapan Anda?

Masyarakat madani itu terjemahan dari "*al-mujtama' al-madany*". Dan ini bahasa Arab untuk *civil society*.

Akan tetapi kemudian, rujukannya tidak lagi pada para teoritikus civil society, tetapi kepada sejarah Islam, seperti Madinah. Hal seperti ini bagaimana?

Hal itu tidak apa-apa.

"Al-mujtama' al-madany" itukan civil society bukan masyarakat madani dalam konotasi Madinah.

Tapi saya kira itu biasa. Orang beragama itu kadang-kadang suka begitu. Dalam arti sesuatu yang dianggap diperoleh melalui mekanisme sekuler, karena dia lahir dari perkembangan masyarakat modern, mungkin Barat, artinya sesuatu yang diperoleh manusia tanpa agama, itu cenderung dibenarkan, disisipkan dengan argumen-argumen keagamaan. Dan ini soal biasa, yaitu sisip-mensisip, supaya enak.

Apakah hal itu merupakan upaya penegasan ideologi Islam, atau lebih pada pencarian landasan-landasan religius agar gerakan-gerakan ini semakin membumi?

Tetapi beberapa kecenderungan bisa ke kemungkinan yang kedua. Misalnya, yang satu menyatakan ajaran Islam itu mengatakan "masyarakat sipil". Surat ini, ayat ini mewajibkan adanya masyarakat sipil dengan lembaga-lembaganya. Kemudian Hadits Nabi ini, begini, lalu sejarah Nabi begini, memerintahkan adanya hal itu. Nanti ada lagi yang menyatakan bahwa masyarakat sipil itu memang tidak ada nash atau ayat yang secara terus terang memerintahkan, menganjurkan supaya membenarkannya. Akan tetapi dikarenakan masyarakat sipil itu sangat diperlukan untuk

mencapai kebaikan kehidupan bersama, maka hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebab kita tidak bisa mencapai sesutu kebaikan bersama kalau tanpa masyarakat sipil. Kemudian mereka mengatakan, misalnya kaidah ushul fikih "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Ini disebabkan karena tidak ada ayatnya atau nashnya. Dan tidak ada yang terus terang bahwa ayat ini menunjukkan ini. Sama juga cara lain yang sering terjadi dalam kalangan umat Islam seperti 'kaidah ushul' yang diderivasi dari itu. Nanti ada lagi cara yang lebih canggih dari itu semua. Jadi ada mekanisme yang lebih canggih akan dilakukan oleh orang lain, seperti Muhammad Arkoun, Abid al-Jabiri, Cak Nur, Masdar -untuk Indonesia- dan masih banyak lagi dan lebih canggih dari yang pertama dengan hanya mengutip ayat dan seterusnya. Ada banyak cara proses berijtihad atau beradaptasi dalam agama, dan itu akan diterapkan dalam kasus seperti wacana masyarakat sipil.

Mengenai keputusan Habibie, atas nama Presiden ia menetapkan masyarakat madani sebagai idealisasi masyarakat Indonesia melalui Kepres, apakah akan mereduksi makna civil society?

Itu tidak aneh. Masyarakat sipil diambil alih oleh negara atau pengambilan simbol. Ada cerita sedikit, dahulu di salah satu negara Eropa Tengah, yang keluar dari Uni Soviet dan menjadi demokrat yaitu Hongaria, ada sebuah parpol, ketika parpol itu menang, pemimpinnya pidato di depan massa dengan mengatakan; kemenangan partai saya ini adalah kemenangan masyarakat sipil. Jadi dengan kata lain, negara telas menjadi masyarakat sipil atau masyarakat sipil telah menjadi negara. Bagi saya, yang dilakukan Habibie itu belum seberapa. Di Hongaria itu malah sudah dinegarakan, seolah-olah masyarakat sipil dan negara menjadi lebur. Dan begitu semangatnya, justru dari dulu orang selalu melihat, ini dua entitas berbeda dan yang satu mengecek yang lain. Kalau masyarakat sipil menjadi Negara, nanti terjadi negara yang sentralis, Orde Baru lagi. Akan tetapi biarin saja...

Yang dikhawatirkan kalangan LSM, civil society itu selama ini menjadi bahasa perlawanan, bahasa kritis, itu telah diambil negara dan dijinakkan, lalu akan hilang bahasa kritisnya.

Itu akan diganti dengan pisau analisis baru, teoritisasi baru. Dan tidak usah khawatir.

Maka kemudian ada kecurigaan, misal apa yang dikembangkan oleh Cak Nur dengan sebutan masyarakat madani itu merupakan akibat dari terambilnya kritisisme dari civil society itu sendiri. Oleh karenanya ada beberapa pakar yang tidak mau menyebut wacana ini sebagai masyarakat madani.

Konsep *civil society* itu diterjemahkan menjadi masyarakat madani yang disyahkan menjadi Keppres, itu hilang kritisismenya. Sebagai satu terma, bisa saja, tetapi sebagai satu praksis, tidak harus.

Melihat perkembangan mutakhir saat ini, prediksi Anda mengenai civil society yang akan datang itu seperti apa?

Kita mungkin harus memperhatikan beberapa hal, soal pemberdayaan, soal pengayaan dan soal pemeliharaan masyarakat sipil. Pemberdayaan, dikarenakan dulu

lama tidak berdaya, sehingga perlu pendampingan, perlu pemberdayaan, perlu pengayaan dan itu mungkin membawa kita supaya lebih sabar melihat masyarakat sipil. Akan tetapi kita perlu juga memperhatikan lawan-lawan dari masyarakat sipil itu sendiri, yaitu kelompok masyarakat yang sangat tidak toleran terhadap orang lain, masyarakat yang tidak bergaul dengan kelompok ideologi atau gagasan yang selama ini mereka kenal. Jadi saya kira itu juga perlu untuk memperhatikan beberapa musuh masyarakat sipil.

Selain musuh dari unsur masyarakat sipil sendiri, salah satu musuh utama adalah dispotisme negara yang sepertinya sudah mulai mengendur. Apakah ini peluang, jebakan atau bagaimana?

Bila sepintas lalu dilihat sepertinya, dispotisme negara melemah. Saya kira tidak, dan itu masih tetap menjadi agenda.

Sekarang sudah terjadi paling tidak 'power sharing', terpecahnya kekuatan-kekuatan, tidak hanya pada satu pihak saja. Paling tidak nilai, intensitas dispotisme akan berkurang.

Kecenderungan sekarang memang ada. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa persoalan masyarakat sipil itu sudah selesai. Kalau kita lihat, sebenarnya pengalaman-pengalaman negara lain Eropa Tengah dan Timur, menunjukkan pemerintahan transisi itu sangat lama. Perlawanan kita sebetulnya belum lama. Mereka pada umumnya memulai tahun 80-an dan sampai 90-an belum selesai juga. Dan juga, apa kita yakin pasti lebih sukses dari mereka. Kita berharap 1 sampai 2 tahun bisa selesai. Rusia, buktinya sampai sekarang belum selesai. Kondisi transisi itu bisa berlarut-larut. Dan kita tidak boleh begitu yakin kita akan melewati panca roba ini dalam 1-2 tahun. Dari situ, mengapa saya mengatakan masyarakat sipil itu masih perlu memperhatikan lawan-lawannya baik yang di dalam dirinya atau di luar dirinya. Terutama negara dan juga konsumerisme dan massa konsumtivis yang muncul dari kapitalisme global, itu salah satu musuh juga.

Gambaran riil Indonesia, ketika misalnya negara sudah demokratis, kemudian civil society itu kuat, bagaimana? Bolehkan berandai-andai?

Kalau saya tidak melihat sesuatu itu sebagai out come, saya tidak tahu. Bagi saya persoalan kita bukan membicarakan demokrasi masyarakat sipil atau Pancasila atau apapun namanya sebagai out come, sebagai hasil atau sebagai state of being. Saya cenderung melihat ini sebagai proses. Berbicara mengenai demokrasi sebagai jalan, bukan sebagai sesuatu yang sudah ada. Jadi tidak perduli apa akan jadi demokrasi atau tidak. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah prosesnya itu. Dan itu saya menganggap demokrasi itu sebagai jalan. Jadi tidak ada jalan menuju demokrasi, karena demokrasi itu sendiri adalah jalan.

Lantas tujuannya apa? Kalau demokrasi itu sebagai sebuah jalan, apakah tanpa ada goal?

Jadi itu sebuah proses. Seperti dalam Islam, tujuan manusia itu apa? Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu menjadi tujuan? Hal itu kan sebuah proses, bagaimana menjalani hidup, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap orang, terhadap sesamanya, terhadap masa akan datang. Pada hakikatnya itu sebuah proses.

Tapi dalam proses itu ada peningkatan, ada eskalasi nilai kemanusiaan?

Itu sudah jelas. Jadi apa proses ini sudah memenuhi syarat-syarat, apa belum. Dan ini bisa kita teliti. Akan tetapi pada akhirnya saya tidak perduli soal masuk surga atau tidak. Itu Allah yang menentukan, tinggal bagaimana Allah menghisab saja. Memang bagi saya pembicaraan mengenai apa demokrasi yang akan dicapai nanti, itu tidak ada gunanya, selain untuk membenahi proses. Jadi anda membayangkan persepsi demokrasi yang begitu-begitulah, itu semuanya akan menjadi spekulasi. Kalau bagi saya persepsi mengenai demokrasi yang ideal itu bukan dijadikan rujukan, melainkan prosesnya. Dan akhirnya kembali pada prosesnya. Kita tidak tahu apakah orang akan mencapai idealitas atau tidak, dan saya tidak perduli, akan tetapi yang bisa kita tunggu sekarang adalah prosesnya. Kalau anda antri, anda mau menunggu atau nyerobot? Atau mau memberi atau tidak orang yang datang meminta pertolongan? Kalau ada ronda di kampung, anda datang apa tidak, kalau ada iuran TV anda bayar apa tidak? Jadi sebetulnya kembali pada prilaku kita sehari-hari.O